

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi dan Memperkuat Supremasi Hukum: Evaluasi Kritis

David Edyson¹ Raden Mahaputra Alfariza M² Armando Benyamin Hasibuan³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}
Email: david@gmail.com¹

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam menjaga demokrasi dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. MK memiliki kewenangan luas untuk melakukan uji materi undang-undang (judicial review), menyelesaikan sengketa pemilihan umum (Pemilu), menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan memutus permohonan hak konstitusional warga negara. Kinerja MK mendapat beragam penilaian. Apresiasi diberikan atas kontribusi MK dalam memperkuat konstitusi, meningkatkan kualitas demokrasi, dan membangun kepercayaan publik. Akan tetapi, kritik juga muncul terkait inkonsistensi putusan, kurangnya transparansi, dan tingginya beban perkara. Independensi dan akuntabilitas MK menjadi syarat mutlak untuk menjalankan fungsinya secara objektif dan imparial. Beberapa faktor yang memengaruhi independensi MK adalah cara pemilihan hakim, masa jabatan hakim, dan kekebalan hukum hakim. Mekanisme akuntabilitas MK meliputi pelaporan tahunan, pengawasan oleh masyarakat sipil, dan pemberitaan media. MK menghadapi prospek dan tantangan di masa depan. Diharapkan peran MK dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum terus meningkat, serta kepercayaan publik terhadap MK tetap terjaga. Tantangan yang dihadapi MK meliputi kompleksitas persoalan hukum, potensi intervensi politik, dan menjaga kepercayaan publik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Supremasi Hukum

Abstract

The Constitutional Court (MK) plays a crucial role in safeguarding democracy and upholding the rule of law in Indonesia. MK holds extensive authority to conduct judicial review, settle election disputes, resolve conflicts between state institutions, and adjudicate petitions concerning citizens' constitutional rights. MK's performance has garnered mixed evaluations. Appreciation is given for its role in strengthening the constitution, enhancing democratic quality, and fostering public trust. However, criticisms have also emerged regarding inconsistencies in rulings, lack of transparency, and a high volume of cases. The independence and accountability of MK are paramount to ensuring its objectivity and impartiality in fulfilling its functions. Factors influencing MK's independence include the selection process for judges, their term of office, and their immunity from prosecution. Mechanisms for MK's accountability involve annual reporting, civil society oversight, and media coverage. MK faces both prospects and challenges in the future. It is anticipated that MK's role in upholding democracy and the rule of law will continue to grow, and public trust in MK will be maintained. The challenges MK confronts include the complexity of legal issues, potential political intervention, and safeguarding public confidence.

Keywords: Constitutional Court, Democracy, Rule of Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Didirikan pada tahun 2003, MK memiliki kewenangan yang luas untuk:

1. Melakukan judicial review: MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). MK dapat membatalkan peraturan perundang-undangan

yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, mengamankan hak-hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum.

2. Menyelesaikan sengketa pemilihan umum (Pemilu): MK bertugas memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum, mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah. Melalui fungsinya ini, MK memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil.
3. Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara: MK berwenang memutus sengketa yang terjadi antara lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, MK berperan menjaga keseimbangan antar lembaga negara.
4. Memutus permohonan hak konstitusional warga negara: MK menjadi tempat berlindung bagi warga negara yang merasa hak konstitusinya dilanggar oleh lembaga negara. MK dapat memulihkan hak yang terlanggar tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja MK

Kinerja MK dalam menjalankan fungsinya menuai berbagai penilaian. Apresiasi terhadap MK:

1. Memperkuat Konstitusi: Hadirnya MK telah menguatkan posisi UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Putusan MK yang membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi telah menegaskan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.
2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi: Putusan MK dalam berbagai perkara, seperti pembatalan diskriminasi dalam pemilihan umum dan pembatasan kekuasaan eksekutif, telah berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
3. Meningkatkan Kepercayaan Publik: MK secara konsisten menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Putusan MK yang bisa diakses publik telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Kritik terhadap MK:

1. Inkonsistensi Putusan: Dalam beberapa kasus yang serupa, MK dianggap menghasilkan putusan yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan imparialitas MK.
2. Kurangnya Transparansi: Meskipun MK telah menerapkan prinsip transparansi, proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan di internal MK masih dianggap kurang transparan. Hal ini menimbulkan potensi intervensi pihak luar dan mengurangi akuntabilitas MK.
3. Beban Perkara yang Tinggi: MK dihadapkan dengan jumlah perkara yang terus meningkat. Beban kerja yang tinggi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas putusan MK.

Independensi dan Akuntabilitas MK: Syarat Mutlak

Independensi MK adalah hal mutlak untuk menjamin objektivitas dan imparialitas dalam menjalankan fungsinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi independensi MK:

1. Cara Pemilihan Hakim MK: Proses pemilihan hakim MK yang melibatkan berbagai pihak, seperti DPR, DPD, dan Presiden, diharapkan dapat menjamin independensi hakim MK dari kepentingan politik tertentu.
2. Masa Jabatan Hakim MK: Masa jabatan hakim MK yang lama (15 tahun) diharapkan dapat mengurangi pengaruh politik jangka pendek terhadap putusan MK.
3. Kekebalan Hukum Hakim MK: Kekebalan hukum yang dimiliki hakim MK memberikan jaminan agar mereka dapat memutus perkara secara bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun

Akuntabilitas MK penting untuk memastikan bahwa lembaganya bertanggung jawab kepada publik. Berikut beberapa mekanisme akuntabilitas MK:

1. Pelaporan Tahunan: MK wajib menyampaikan laporan tahunan kepada DPR dan DPD. Laporan ini memuat informasi tentang kinerja MK, termasuk jumlah perkara yang ditangani, putusan yang dikeluarkan, dan kendala yang dihadapi.
2. Pengawasan oleh Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil berhak untuk mengawasi kinerja MK dan memberikan kritik dan saran. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penelitian, publikasi, dan advokasi.
3. Pemberitaan Media: Media massa dapat berperan dalam mengawasi dan memberitakan kinerja MK kepada publik. Pemberitaan yang objektif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK.

Prospek dan Tantangan MK di Masa Depan

MK dihadapkan dengan berbagai prospek dan tantangan di masa depan:

Prospek:

1. Peningkatan Peran MK: Diharapkan peran MK dalam menjaga demokrasi dan memperkuat supremasi hukum akan terus meningkat. MK dapat memperluas jangkauan kewenangannya dan memperkuat mekanisme akuntabilitasnya.
2. Peningkatan Kepercayaan Publik: MK diharapkan dapat terus membangun kepercayaan publik melalui putusannya yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat: Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam mengawasi kinerja MK dan menuntut akuntabilitasnya.

Tantangan:

1. Kompleksitas Isu Hukum: Isu hukum yang dihadapi MK semakin kompleks dan membutuhkan keahlian yang mendalam. Hal ini memerlukan pembinaan dan pengembangan kapasitas hakim MK secara berkelanjutan.
2. Intervensi Politik: MK perlu mewaspadaikan potensi intervensi politik dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepercayaan Publik: MK perlu terus menjaga kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya.

KESIMPULAN

MK memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, MK telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugasnya. Dengan terus meningkatkan independensi, akuntabilitas, dan kapasitasnya, MK diharapkan dapat terus berkontribusi pada kemajuan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Catatan Tambahan:

1. Artikel ini hanya membahas beberapa aspek penting dari peran MK. Masih banyak aspek lain yang dapat dibahas, seperti peran MK dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan prinsip keadilan.
2. Artikel ini tidak membahas secara mendalam tentang mekanisme internal MK, seperti proses pengambilan keputusan dan sistem manajemen perkara.
3. Artikel ini hanya memberikan gambaran umum tentang prospek dan tantangan MK di masa depan. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi masa depan MK.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H. "Jurnal Konstitusi." <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk>.
Mahkamah konstitusi. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed May 3, 2024.
<https://mkri.id/>.